

**REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK
MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS**

DISERTASI

Oleh

**MARIA JULIANTI
2307190003**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK
MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**MARIA JULIANTI
2307190003**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Julianti
NIM : 2307190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM RESTRUKTURISASI
PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN
PEMEGANG POLIS”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 April 2026



MARIA JULIANTI
NIM: 2307190003



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM RESTRUKTURISASI
PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN
PEMEGANG POLIS**

Oleh:

Nama : Maria Julianti
NIM : 2307190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian
Tebuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program
Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 9 April 2026

Menyetujui,

Promotor

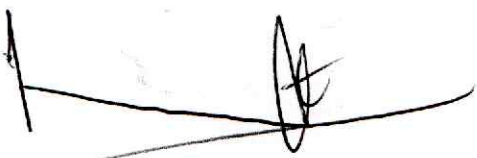


Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

NIP/NUPTK: 091692/ 6358738639130043

Co Promotor I

Co Promotor II



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 141103/ 5336740641130063



Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.
NIP/NUPTK: 171444/ 4737742643230112



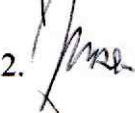
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 09 April 2026 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Maria Julianti
NIM : 2307190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Sc., M.Si., Ph.D.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Penguji	3. 
4	Assoc. Prof. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Penguji	4. 
5	Assoc. Prof. Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.	Penguji	5. 
6	Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Penguji	6. 
7	Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM RESTRUKTURISASI
PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN
PEMEGANG POLIS**

Nama : Maria Julianti
NIM : 2307190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 9 April 2026

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Dekan



Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093

Kaprodi



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NUPTK: 191690/0150727628130043



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maria Julianti
NIM : 2307190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI
UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN
PEMEGANG POLIS

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 April 2026



MARIA JULIANTI
NIM: 2307190003

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tugas dari Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul : “REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada : Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku promotor yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan yang berharga dalam penyusunan disertasi ini, serta kepada Assoc. Prof. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor 1 yang telah meluangkan waktu dalam bimbingan ini dan juga kepada Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Si., selaku Ko-Promotor 2 yang telah terus memberikan bimbingan waktu tanpa batas dan sabar mendorong peneliti untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi ini. Penulis menyadari ada banyak pihak yang berperan dalam proses penyusunan disertasi ini. Dengan rasa hormat dan bangga Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum., selaku Penguji Eksternal.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. David L. Tobing, S.H., M.Kn. selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi

kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

2. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H. selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.
5. Segenap civitas akademika Universitas Kristen Indonesia, khususnya jajaran Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta staf administrasi akademik yang telah banyak membantu proses administrasi penyelenggaraan pendidikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Hukum Fakultas hokum Universitas Kristen Indonesia angkatan VII.
7. Suami dari penulis tercinta Chandra Ginting dan putra ku tersayang Lawerry Valentino Ginting, Geralddo Fabian Ginting dan putri ku tersayang Charen Angelene Ginting yang dengan setia dan sabar dalam mendukung penulis dalam segala hal terlebih dalam doa sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini.
8. Orang tua ku tercinta † Bapak D.Situmorang dan Ibu Tiambun Samosir yang menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan doktor ini.
9. Para rekan-rekan, seluruh staff dan karyawan pada kantor Rhen Situmorang & Partners yang telah banyak membantu dan

menyemangati serta mendoakan penulis dan keluarga dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Karenanya perkenankanlah penulis berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan kasih karunia atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam perkuliahan sampai selesainya disertasi ini. Selain itu penulis juga berharap agar apa yang tertuang dalam disertasi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun pengembangan Hukum Bisnis secara khusus.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya segala masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan untuk kesempurnaan disertasi ini.

Jakarta, 09 April 2026

MARIA JULIANTI

Daftar Isi Disertasi:

Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir.....	ii
Lembar Persetujuan Tim Promotor	iii
Lembar Persetujuan Dewan Penguji	iv
Lembar Pengesahan	v
Lembar Pernyataan dan Pesetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Abstrak.....	xiii
Abstract.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	20
C. TUJUAN PENELITIAN	20
D. KEGUNAAN PENELITIAN	21
1. Kegunaan Teoritis.....	21
2. Kegunaan Praktis	22
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	22
F. METODE PENELITIAN	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
4. Teknik Kumpul Data.....	26
5. Teknik Analisa Data	26
6. Pendekatan Penelitian	26
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	28
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	31
BAB II PENGATURAN RESTRUKTURISASI DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA	34
A. LANDASAN TEORI	34

1.	Teori dari Gustav Radbruch tentang tujuan hukum	34
2.	Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick)	38
B.	LANDASAN KONSEPTUAL	40
1.	Asuransi	48
2.	Kepailitan	102
3.	Sejarah Kepailitan	108
4.	Asas dan prinsip-prinsip Hukum Kepailitan	122
5.	Syarat Hukum Kepailitan	125
6.	Hukum Acara Kepailitan dan PKPU	127
7.	Restrukturisasi	141
8.	Restrukturisasi dan Kepailitan yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	146
9.	Perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi	151
10.	Fungsi Hukum Kepailitan Terhadap Perlindungan Pemegang Polis ...	158
C.	PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN TENTANG . RESTRUKTURISASI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI	169
1.	Amerika Serikat	169
2.	Singapura	193
3.	Malaysia	198
BAB III IMPLEMENTASI DAN PENERAPAN HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA SERTA ALASAN PENGATURAN TERSEBUT MAMPU MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS		208
A.	HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA	208
1.	Pengaturan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia Terhadap Perusahaan Asuransi	208
2.	Analisis Pengaturan Kepailitan dan PKPU di Indonesia Terhadap Perusahaan Asuransi Dikaitkan Dengan Teori Tujuan Hukum dan Teori Hukum Responsif	215
B.	IMPLEMENTASI HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA, KHUSUSNYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS ASURANSI	221
1.	Kasus-kasus di Indonesia	221

a.	Kasus Kepailitan Perusahaan Asuransi di Indonesia.....	221
1)	Kasus Permohonan Kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 222	
2)	Kasus Permohonan Kepailitan PT Asuransi Jiwa Kresna	225
3)	Kasus Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah.....	227
b.	Kasus Penyelamatan Perusahaan Asuransi di Indonesia	230
1)	AJB Bumiputera 1912	230
2)	PT Asuransi Jiwa Bakrie Life	242
3)	Asuransi Jiwasraya	249
C.	ANALISIS KORELASI ANTARA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN TERKAIT HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI ASPEK TEORI HUKUM ...	264
	BAB IV MODEL REKONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN YANG IDEAL UNTUK MENDUKUNG RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA GUNA MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS.....	279
	BAB V PENUTUP.....	307
A.	Kesimpulan.....	307
B.	Saran.....	309
	DAFTAR PUSTAKA.....	313

ABSTRAK

Judul Disertasi: Rekonstruksi Hukum Kepailitan dalam Restrukturisasi Perusahaan Asuransi untuk Memperkuat Perlindungan Pemegang Polis

Kata Kunci: ***Kepailitan, Restrukturisasi, Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis***

Kepailitan dan restrukturisasi perusahaan asuransi di Indonesia menghadapi persoalan fundamental berupa disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Fragmentasi pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam perlindungan pemegang polis yang seharusnya menjadi prioritas karena karakter industri asuransi yang mengelola dana publik dan memiliki risiko sistemik tinggi. Selain itu, realitas implementasi menunjukkan adanya jurang antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penyelesaian gagal bayar (*das sein*), sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus seperti AJB Bumiputera, Kresna Life, dan Bumi Asih Jaya.

Penelitian ini menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yaitu Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terkait keadilan, kepastian, dan kemanfaatan; serta konsep Hukum Responsif Nonet & Selznick untuk menilai sejauh mana regulasi kepailitan mampu menjawab kebutuhan sosial dan melindungi kelompok rentan, khususnya pemegang polis. Ketiga teori ini digunakan sebagai landasan evaluatif untuk menilai integrasi regulasi, kinerja kelembagaan, serta arah perlindungan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan doktrin; serta bahan non-hukum seperti laporan industri. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan pendekatan perbandingan. Seluruh data kemudian dianalisis secara normatif- kualitatif dengan menafsirkan fakta hukum berdasarkan teori, asas, dan ketentuan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara UU Kepailitan, UU OJK, dan UU Perasuransian mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap pemegang polis serta ketidakpastian kewenangan antara pengadilan niaga, OJK, dan pemerintah. Mekanisme kepailitan umum yang bersifat adversarial tidak sesuai dengan karakter industri asuransi yang membutuhkan pendekatan prudensial. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum melalui harmonisasi undang-undang, penegasan kewenangan eksklusif OJK dalam restrukturisasi dan kepailitan asuransi, pengakuan pemegang polis sebagai kreditur preferen, pembentukan Lembaga Penjamin Polis, serta pembentukan rezim *insurance resolution* yang terpisah dari kepailitan umum. Rekonstruksi struktural, substansial, dan kultural ini diperlukan untuk mewujudkan perlindungan pemegang polis yang lebih efektif serta sistem hukum kepailitan yang responsif dan adaptif.

ABSTRACT

Title: ***Reconstruction of Bankruptcy Law in Insurance Company Restructuring to Strengthen Policyholder Protection***

Keywords: ***Bankruptcy, Restructuring, Insurance Companies, Policyholders***

Bankruptcy and restructuring of insurance companies in Indonesia face a fundamental issue arising from regulatory disharmony between Law No. 37/2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment, Law No. 21/2011 on the Financial Services Authority (OJK), and Law No. 40/2014 on Insurance. This fragmentation generates substantial legal uncertainty, particularly regarding the protection of policyholders who should be prioritized due to the systemic nature of the insurance industry and its role in managing public funds. In practice, a significant gap exists between the normative framework (*das sollen*) and actual law enforcement (*das sein*), as evidenced by cases such as AJB Bumiputera, Kresna Life, and Bumi Asih Jaya.

The research is grounded in several key legal theories: Gustav Radbruch's Theory of Law (justice, certainty, and utility), and Nonet & Selznick's concept of Responsive Law, which emphasizes the law's ability to address social needs and protect vulnerable groups such as policyholders. These theories serve as analytical tools to evaluate normative integration, institutional performance, and the ideal legal framework for insurance restructuring and bankruptcy.

This study employs a normative juridical research method, treating law as a normative system. Data consist of primary legal materials, including legislation and court judgments, secondary materials such as legal literature, journals, and doctrines, and relevant non-legal materials. The research uses a statute approach combined with comparative analysis. Data collection was conducted through literature study. The collected data were analyzed normatively and qualitatively by interpreting legal facts using statutory norms, legal doctrines, and theoretical frameworks.

The findings indicate that the lack of synchronization among the Bankruptcy Law, the OJK Law, and the Insurance Law weakens legal protection for policyholders and creates overlapping authority between commercial courts, OJK, and the government. The general bankruptcy mechanism, being adversarial and creditor-oriented, is incompatible with the prudential nature of the insurance industry. Therefore, the study concludes that legal reconstruction is necessary through statutory harmonization, explicit recognition of OJK's exclusive authority in insurance bankruptcy and restructuring, granting policyholders preferential creditor status, establishing a Policyholder Protection Fund, and developing a distinct insurance resolution regime separate from general bankruptcy proceedings. These structural, substantive, and cultural reforms are essential to ensure effective policyholder protection and to build a responsive and adaptive legal system for the insurance sector.